BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah.

Menurut American Accounting Association (AAA) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Belkaoui dalam bukunya Teori Akuntansi sebagaimana dikutip oleh Harahap menyebutkan beberapa image (citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut (Haryono Jusuf, 2004:5) :

a) Akuntansi sebagai suatu ideologi, karena akuntansi dinilai menopang atau sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal.

b) Akuntansi sebagai suatu bahasa, karena ia menyampaikan, mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengan bahasa, sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.

c) Akuntansi sebagai suatu catatan historis, ia hanya mencatat apa yang sudah terjadi, dan akuntansi tidak dapat mencatat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

d) Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, ia sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis.

e) Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karena ia mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan.

f) Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntansi dianggap merupakan sarana manajemen pertanggungjawaban pengelolaannya atas harta kekayaan perusahaan yang diamanahkan pemiliknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara teknis akuntansi adalah kumpulan tata cara pencatatan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dan terakhir menginterprestasikan laporan tersebut.

Sedangkan syari'ah adalah berasal dari kata syara'a yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syara'a sering disebut syara' atau syir'ah.

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yaitu akuntansi dan syariah, pengertian bebas dari akuntansi adalah pengidentifikasian transaksi yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk ditaati oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya di dunia, sehingga akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Ada dua versi akuntansi syariah, pertama akuntansi syari'ah yang sebenarnya telah diterapkan pada jaman dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam, terutama masyarakat yang menggunakan sistem nilai Islam, terutama pada jaman Nabi SAW, Khulafaurrasyidin, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua akuntansi syari'ah yang saat ini

muncul di jaman di mana aktivitas ekonomi dan sosial dikendalikan oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.

2.1.2. Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

a. Pengertian Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

Organisasi nonlaba (nirlaba) berasal dari kata organisasi dan nonlaba. Organisasi berasal dari bahasa Yunani " Organ" yang berarti " alat ". Secara umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah bagi sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama (Janis & Budiarso, 2017: 103).

Organisasi ialah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi terus menerus untuk mencapai seperangkat tujuan bersama. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang. Untuk setiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan stabilitas lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan stabilitas lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang lebih kompleks dan canggih.

Nonlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Entitas nonlaba ialah organisasi yang dapat dimiliki oleh pemerintah ataupun sektor swasta, yang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan laba, Entitas norlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan apapun (Janis & Budiarso, 2017: 103).

Organisasi nonlaba adalah organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung suatu isu atau hal dalam menarik perhatian publik untuk tujuan non komersil, tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat mencari keuntungan (moneter).

Organisasi nonlaba (nirlaba) meliputi masjid, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi professional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Menurut ISAK no 35 (2018) organisasi nonlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan pihak anggota. Para donatur ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh seiring dengan pertumbuhan organisasi

Organisasi nonlaba (nirlaba) dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas nonprofit pemerintahan dan entitas nonprofit non pemerintahan. Organisasi nonprofit mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi kepada profit oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nonprofit (Wulandari, 2015 : 1) .

Organisasi nonlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi tersebut pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Pendirian organisasi nonprofit dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata dipengaruhi oleh profit. Semua kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan keuntungan, akan tetapi dalam perjalanannya organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan dari kinerja keuangan yang baik yang disebut dengan surplus karena arus kas masuk melebihi arus kas keluar. Perolehan surplus ini dibutuhkan oleh organisasi nonprofit (nirlaba) yang berfungsi

untuk memperbesar skala kegiatan pelayanannya dan memperbaharui fasilitas yang rusak (Rahayu, 2019 : 37-38).

Organisasi nonlaba (nirlaba) memiliki sasaran utama untuk tujuan non komersil, tanpa ada maksud untuk mencari keuntungan (laba). Layaknya sebuah erusahaan, tranparasi dan akuntanbilitas begitu sangat diperlukan dalam organisasi nirlaba (Lastiva dan Muslimin, 2020: 64). Peraturan mengenai organisasi nirlaba di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan yaitu : Undang-undang RI no. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah menjadi UU RI no. 28 tentang perubahan atas UU RI no. 16 tentang Yayasan, dan juga undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Dengan tujuan sosialnya organisasi nirlaba seringkali menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian mengelolanya untuk kepentingan masyarakat luas. Sehubung dengan adanya kegiatan penghimpunan dana masyarakat tersebut, maka organisasi sosial perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel kepada masyarakat luas. Untuk keperluan akuntabilitas dana organisasi nonlaba (nirlaba), regulator juga menyediakan instrumen penyusunan laporan keuangan yang terstandar (Andriani , Basyirah Ainun, Nurhidayati, 2018: 92).

b. Tujuan Organisasi Nonlaba (Nirlaba).

Organisasi nonlaba memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan keuntungan atau profit dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik dan rekreasi (Rahayu, 2019: 39-40). Sehingga, organisasi nirlaba dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara dengan masyarakat yang sejahtera karena tidak berorientasi pada profil.

c. Karakteristik Organisasi Nonlaba (Nirlaba)

Karakteristik organisasi nonlaba (nirlaba) berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan mendasar utama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan operasi mereka. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, seperti misalnya penerimaan sumbangan (Pontoh, 2013: 130).

2.1.3 Pengertian Masjid.

Masjid disebutkan berkali kali didalam Al-Quran dan hadis. Masjid berasal dari kata sajada – yasjudu yang artinya merendahkan diri, menyembah atau bersujud, kata masjid di ambil dari kata bahasa arab sajada- yasjudu- sujudaa yang berarti meletakkan diatas bumi (bersujud) sedangkan masjid dalam bahasa arab memiliki arti tempat sujud (Umar, 2019 : 13).

Masjid merupakan rumah ibadah umat muslim dan masjid juga merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual islam dikembangkan, dan pada kenyataannya masjid yang merupakan entitas publik memerlukan suatu pengelolaan yang transparan, akuntabilitas dan dalam pengelolaannya juga sangat melibatkan masyarakat. Untuk itulah masjid membutuhkan peran pembukuan dan akuntansi untuk membuat laporan keuangan, agar masyarakat dan jamaah mengetahui tentang proses keuangan yang terjadi dalam pengelolaannya..

Selama ini pengurus membuat laporan keuangan adalah dalam upaya untuk mempertanggung jawabkan serta untuk menjawab kecurigaan yang sering muncul dari para

jamaah. Karena sumber dana masjid biasanya berasal dari masyarakat, dan masyarakat tentunya sangat kritis terhadap penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari instansi pemerintah dalam rangka pembangunan masjid, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masjid secara teratur. Penggunaan akuntansi dalam menyampaikan laporan keuangan masjid dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan keterbukaan. Sebuah masjid sangat diperlukan suatu sistem untuk mengelola keuangan pada sebuah mesjid. Apalagi kebanyakan masjid di Indonesia dikelola secara tradisional. Laporan keuangan dan aliran kas yang selama ini dijalankan oleh pengurus mesjid masih dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas (Zulkifli, 2014: 71).

Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir). Organisasi masjid merupakan organisasi non profit ,yaitu dalam menjalankan bisnis bukan untuk mencari keuntungan, tetapi semata–mata hanya untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki masjid biasanya juga cukup besar, terdapat sebidang tanah dan nilai bangunan, serta perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam masjid.

Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin (listrik, air),biaya kebersihan, biaya kegiatan islami yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari besar islam Maulid Nabi SAW, Safari Ramadhan, dan sebagainya. Dana untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan Masjid dan lain lain. Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban para pengurus mesjid atau takmir sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan yang telah diberikan. Laporan oraganisasi mesjid memberikan informasi meliputi :

1) Aset/harta
2) Kewajiban/hutang
3) Ekuitas/modal
4) Pendapatan, dan
5) Arus Kas (Andarsari, 2016: 147-148).

Masjid merupakan organisasi nirlaba harus dan berhak untuk membuat laporan dan melaporkannya kepada para pemakai pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sudah sewajarnya mengingat hidup dan berkembangnya organisasi masjid bersumber dari sumbangan, sedekah, atau bentuk bantuan sosial lainnya. Organisasi harus membuka diri terhadap hak masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidak-tidaknya terhadap anggota organisasi keagamaan tersebut. Informasi dapat diakses oleh siapa saja dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga tidak Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat buruk terhadap organisasi. Konsekuensi ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi karena kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan organisasi mesjid akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid itu sendiri (Rahayu, 2014: 632).

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dimana kebanyakan mesjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Masjid

merupakan organisasi nonlaba (termasuk organisasi pengelola masjid) yang cenderung menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu manajemen nya harus dapat dipercaya, menganut transparansi dan selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya (Ismatullah, Kartini, 2018: 187).

2.1.4 Pendapatan Masjid.

Sumber pendapatan masjid diperoleh dari infaq, shodaqoh, zakat dan waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya gaji, biaya rutin (listrik,air), biaya kebersihan,biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam Maulid Nabi SAW, Ramadhan, dan lain sebagainya. Dalam mempertanggungjawabkan sumber pendapatan dan pengeluaran tersebut pengurus masjid (takmir) diwajibkan untuk mencatat, menyusun dan mengelola keuangan tersebut dengan baik, kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu wujud bahwa pengurus masjid (takmir) adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab. Selain itu sebagaimana yang dipaparkan oleh Kurniasari (2011) bahwa pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan faktor utama dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kemakmuran masjid.

Dari sumber dana tersebut pengelola keuangan masjid yaitu ta‟mir harus mampu menyajikan laporan keuangan masjid dengan baik dan mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Karena biasanya yang kita ketahui laporan keuangan masjid hanya disajikan setiap satu minggu sekali pada saat sholat jumat. Maka dari itu pengurus masjid diharapkan mampu melaporkan informasi keuangan masjid secara terbuka kepada publik sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan masyarakat merasa puas atas pengelolaan keuangan masjid tersebut.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan kepada pengelola/pengurus masjid untuk mampu mempublikasikan transparansi danadan penyusunan laporan keuangannya. Dengan adanya transparansi dana dan pengelolaan keuangan masjid maka akan memberikan ketenangan kepada masyarakat dan percaya ketika akan menyumbangkan uangnya atau dananya. (Andikawati, 2014).

2.1.5 Konsep Dasar ISAK No.35

11 April 2019, DSAK IAI mengesahkan ISAK 35, tentang penyajian laporan keuangan tahunan organisasi nirlaba awal bulan Januari 2020.

Pada awalnya organisasi nirlaba diatur didalam PSAK 45 2017 yang dicabut dan diubah menjadi ISAK 35. Perbedaan antara PSAK 45 dan ISAK 35 yaitu pada klasifikasi aset neto, yang menggabungkan aset neto yang dibatasi penggunaannya secara permanen dengan aset neto yang dibatasi penggunaannya. Konversi sementara ke aset neto terbatas (dengan batasan) akan mengurangi kompleksitas dan mengubah aset neto tak terbatas menjadi aset neto tak terbatas yang memungkinkan pengguna laporan keuangan nirlaba untuk lebih memahami dan mendapat manfaat lebih.

2.1.6 Akuntabilitas Publik dan Entitas Keagamaan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah-langkah semua keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.”

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :
“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pemimpin organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan atau informasi.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:9) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :
“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanat (mandat).”

Menurut Indra Bastian (2010:385) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:
“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menjelaskan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.”

Serta menurut Deddi Nordiawan (2008:129) Akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :
“Akuntabilitas Publik bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pemantau independen yang berhak melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah dituntut untuk menyajikan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala kegiatannya khususnya dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Entitas keagamaan tersebut seperti: Gereja, Masjid, dan Vihara merupakan suatu organisasi yang termasuk dalam jenis organisasi nirlaba..
Akan tetapi, Simanjuntak dan Januarsi (2011) menjelaskan bahwa tuntutan Akuntabilitas harus diikuti dengan penyediaan kapasitas untuk menjalankan Keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik secara luas atau kepada lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Dalam konteks entitas keagamaan, akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan kehendak Tuhan (the will of God) Triyuwono, (2003). Artinya, manusia mempunyai kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kemudian, akuntabilitas horizontal dalam konteks keagamaan merupakan hasil dari hubungan antara agen (manajemen) dengan masyarakat (stakeholder) dan lingkungan (alam semesta) Triyuwono, (2003). Hubungan ini mewajibkan

pertanggungjawaban kepada orang-orang yang terkait (stakeholder) dan lingkungan (alam semesta).

2.1.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK NO 35.

Berdasarkan ISAK NO 35 rangkaian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba adalah sebagai berikut:

1. PSAK 1 : Penyajian laporan keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa "Pernyataan ini menggunakan terminologi yang lebih sesuai untuk entitas berorientasi laba, termasuk badan usaha sektor publik. Jika entitas dengan kegiatan nirlaba di sektor publik atau sektor swasta menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terkandung didalamnya" Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nirlaba.
2. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak memberikan panduan tentang bagaimana entitas dengan aktivitas nirlaba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan kegiatan non profit dalam Interpretasi ini kemudian merujuk pada entitas non profit oriented.
3. Karakteristik entitas non profit oriented berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi profit. Perbedaan mendasar antara entitas yang berorientasi non profit dengan entitas bisnis berorientasi profit terletak pada cara entitas berorientasi non profit memperoleh sumber untuk menjalankan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi non profit memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sepadan dengan jumlah sumber daya yang disediakan.

2.1.8. Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK NO 35.

Menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna untuk sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan menyajikan informasi tentang entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang disertakan dengan informasi lain yang terkandung dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan ISAK no 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas non profit oriented meliputi : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini adalah contoh dari laporan keuangan entitas non profit :

1. Laporan Posisi Keuangan.

Laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Berikut ini penulis akan mematentan mengenai tujuan laporan posisi keuangan, klasifikasi aset dan liabilitas, klasifikasi aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur

tersebut pada titik waktu tertentu. Laporan keuangan entitas meliputi secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

Laporan keuangan entitaas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aset

Sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas (IAI, 2011). Secara umum, entitas menyajikan dan mengumpulkan aset dari kelompok yang homogen. Antara lain sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas
b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain
c. Persediaan
d. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
e. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
f. Gedung,peralatan, tanah, serta aset tetap lain yang digunakan untuk memperoleh barang jasa

b) Liabilitas

Liabilitas adalah klaim dari pihak ketiga atas aset entitas. Liabilitas disusun menurut urutan jatuh temponya dari liabilitas/kewajiban tersebut. Liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar, sedangkan liabilitas yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun diklasifikakepad sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh urutan dan penyajian liabilitas adalah :

a. Hutang
b. Pendapatan diterima dimuka
c. Hutang jangka panjang
d. Hutang lainnya.

Dalam penyajiannya, kewajiban tetap disusun berdasarkan masa jatuh temponya.

c). Aset Bersih

1. Aset bersih tidak terikat.

Aset bersih jenis ini umumnya mencangkup pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembatasan penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontraktual dengan kreditur, pemasok dan pihak lain yang terkait dengan organisasi.

2. Aset bersih terikat temporer.

Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan atau keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku untuk (1) sumbangan dalam bentuk aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (4) Perolehan aset tetap. Informasi tentang jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Aset bersih terikat permanen.

Pembatasan ini dapat ditempatkan pada (1) aset seperti tanah atau karya seni yang dihibahkan untuk tujuan tertentu, untuk tidak dijual dan untuk dirawat, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang menghasilkan pendapatan permanen. Kedua jenis

pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1

Format Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (*dalam jutaan rupiah*)		
	20X2	**20X1**
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	**xxxx**	**xxxx**
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	**xxxx**	**xxxx**
ASET NETO		
Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxxx	xxxx
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	**xxxx**	**xxxx**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	**xxxx**	**xxxx**

Sumber: DE ISAK 35.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan yang menyajikan laporan laba dan rugi suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Dimana laporan ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi seperti pendapatan dan beban entitas selama suatu periode.

Laporan laba rugi komprehensif menyajikan informasi mengenai :

a) Pendapatan

b) Beban keuangan

c) Bagian laba atau rugi dari investasi dengan menggunakan metode ekuitas

d) Beban pajak

e) Laba rugi atau rugi neto

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Tabel 2.2
Format Laporan Penghasilan Komprehensif

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (*dalam jutaan rupiah*)		
	20X2	**20X1**
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	**xxxx**	**xxxx**
Beban		
Gaji, upah	xxxx	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	xxxx
Administratif	xxxx	xxxx
Depresiasi	xxxx	xxxx
Bunga	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Beban (catatan E)	**xxxx**	**xxxx**
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx
Total Beban	**xxxx**	**xxxx**
Surplus (Defisit)	**xxxx**	**xxxx**
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	**xxxx**	**xxxx**
Beban		
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	**xxxx**	**xxxx**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	**xxxx**	**xxxx**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**xxxx**	**xxxx**

Sumber: DE ISAK 35

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Tujuan utama dari laporan perubahan aset neto adalah menyediakan informasi terkait pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dana sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas umumnya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3) gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin dalam nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholders untuk:

a. Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode,
b. Menilai upaya, kemampuan, dan berkelanjutan organisasi dan memberikan jasa,
c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manager.

Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi oleh donatur.
b. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat.
c. Sumbangan dapat disajikan sebagai tambahan untuk aset bersih tidak terikat, terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
d. Jika terdapat sumbangan terikat temporer yang pembatasanya tidak berlaku lagi pada periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
e. Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lainnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi.
f. Terlepas dari ketiga jenis aset bersisebagaiman seperti yang telah dijelaskan organisasi nonlaba masih memiliki kesempatan untuk menambah klasifikasi aset bersih jika diperlukan. Klasifikasi ini dapat dilakukan menurut kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak, telah direalisasikan, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aktivitas organisasi.

Selanjutnya, komponen dalam laporan aktivitas meliputi :

A. <u>Pendapatan</u>

1. Sumbangan.
2. Jasa layanan.
3. Penghasilan investasi.

Semua pendapatan disajikan bruto. Tetapi, khusus untuk pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen lain yang juga disajikan dalam jumlah neto yaitu keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada diluar kendali organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian atas penjualan tanah dan bangunan yang tidak digunakan lagi.

B. <u>Beban</u>

a. Beban yang berkaitan dengan program pemberian layanan/jasa. Aktivitas yang berkaitan dengan beban jenis ini antara lainnya meliputi aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi.

b. Beban yang terkait dengan aktivitas pendukung (mencangkup semua aktivitas selain program pemberian layanan). Secara umum, aktivitas pendukung antara lain meliputi :

1) Aktivitas manajemen dan umum, meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, pengangguran, pendanaan, dan aktivitas administrasi lainnya.
2) Aktivitas pencarian dana, diantara meliputi publikasi dan kampanye penggalangan dana; pengadaan daftar alamat donatur; pelaksanaan acara khusus penggalangan dana; pembuatan dan penyebaran manual, intruksi, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari perorangan yayasan, pemerintah dan lain sebagainya.
3) Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuaran anggota, hubungan dan aktivitas serupa. Perlu diperhatikan bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus memberikan informasi tentang beban menurut klasifikasi dungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi ini berguna untuk membantu para stakeholders dalam menilai pemberjas layanan dan penggunaan sumber dayapenyajia menyajikan klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tmengena tentang beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, depresiasi.

Tabel 2.3
Format Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ
Laporan Perubahan Aset Neto
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Total	xxxx	xxxx
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
TOTAL ASET NETO	xxxx	xxxx

Sumber: DE ISAK 35.

4. Laporan Arus Kas

Didalamnya memberikan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam satu periode tertentu. Menurut SAK ETAP, dalam laporan arus kas terdapat beberapa informasi mengenai :

a. Aktivitas operasi

   Aktivitas ini diperoleh dari aktivitas utama pendapatan utama entitas. Dalam bentuk transaksi, aktivitas, dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi laba rugi.

b. Aktivitas investasi

   Aktivitas ini diperoleh dari pengeluaran kas dengan tujuan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

c. Aktivitas pendanaan.

   Merupakan aktivitas yang dapat mempengaruhi perubahan komposisi aset dan liabilitas, misalnya aktivitas pendanaan yaitu pelunasan pinjaman dan penerimaan kas dari pinjaman, arus kas pendanaan dapat bernilai surplus dan defisit.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Tabel 2.4
Format Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (*dalam jutaan rupiah*)		
	20X2	**20X1**
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Kas neto dari aktivitas operasi	**xxxx**	**xxxx**
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(xxxx)**	**(xxxx)**
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:		
Investasi dalam dana abadi (*endowment*)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
Aktivitas pendanaan lain:		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(xxxx)**	**(xxxx)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**xxxx**	**xxxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	**xxxx**	**xxxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**xxxx**	**xxxx**

Sumber: DE ISAK 35

Tabel 2.5
Format Arus Kas (metode tidak langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (*dalam jutaan rupiah*)		
	20X2	**20X1**
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Kas neto dari aktivitas operasi	**xxxx**	**xxxx**
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(xxxx)**	**(xxxx)**
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:		
Investasi dalam dana abadi (*endowment*)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
Aktivitas pendanaan lain:		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(xxxx)**	**(xxxx)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**xxxx**	**xxxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	**xxxx**	**xxxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**xxxx**	**xxxx**

Sumber: DE ISAK 35

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang estimasi yang diyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan inperincia rincian dari suatu perkiraaan yang disajikan seperti misalnya aset tetap.

Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, liabilitas, aset neto. Misalnya, untuk aset tetap di catatan atas laporan keuangan akan dijelaskan perhitungan penyusutan aset tetap, serta kebijakan akuntansi lain yang digunakan oleh entitas tersebut.

2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan didalam sebuah penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan sekumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh para peneliti dan hasil penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada umumnya pembahasan mengenai laporan keuangan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurur Rahman Tamanan, Bondowoso Berdasarkan ISAK NO 35.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurur Rahman Tamanan, Bondowoso Berdasarkan ISAK NO 35 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Filza Ghassani (2020)	"Laporan Keuangan Masjid Madinatul Munawaroh"	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dsajikan masjid Madinatul Munawaroh belum disusun berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan Masjid Madinatul Munawaroh seperti laporan keuangan masjid pada umumnya, hanya laporan keuangan sederhana yaitu pemasukan dan pengeluaran tanpa mengelompokkan berdasarkan kategorinya dan masih menggunakan bahasa sendiri
2	Rizka Ariyanti (2020)	"Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada UTD	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara keseluruhan UTD PMI Kabupaten Pekalongan sudah mengacu pada ketentuan PSAK No. 45, akan tetapi ada satu

		Kabupaten Pekalongan"		indikator yang kurang tepat yaitu klasifikasi liabilitas yang belum dikelompokkan menjadi liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3	Ahmad Fauzi (2020)	"Implementasi PSAK No. 45 pada Laporan Keuangan"	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Al-Miftah belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 45 pada laporan keuangannya, Yayasan Al-Miftah hanya menyajikan laporan posisi keuangan.
4	Sri Nelva Susanti (2020).	"Analisis Penerapan ISAK No. 35 terhadap Laporan Keuangan pada Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir"	Deskriptif Kualitatif	hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh yayasan tidak sesuai dengan ISAK No. 35 dan pencatatan yang diterapkan oleh yayasan MTS Al- Manar hanya berbasis kas.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, akan tetapi pada intinya berbeda meskipun pembahasannya mengenai hal yang sama. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, sedangkan persamaan dengan penelitian yang terdahulu terdapat pada pembahasan laporan keuangan organisasi nirlaba maupun ISAK 35. Dikarenakan ISAK no 35 baru berlaku efektif sejak awal tahun 2020, penelitian tentang ISAK 35 belum banyak sehingga peneliti juga menggunakan literatur yang terkait dengan ISAK 35 yakni PSAK 45. PSAK 45 mengatur tentang pelaporan keuangan entitas non profit, sedangkan ISAK 35 mengatur penyajian laporan keuangan entitas berrorientasi non profit..